



PERAN PERPUSTAKAAN AKADEMIK DALAM MEMBANGUN BUDAYA DISKUSI KRITIS: PERSPEKTIF TEORI RUANG PUBLIK HABERMAS (STUDI DI UNISMA)

Ach. Nizam Rifqi¹, Khoirul Anwar², Astria Khairizah³, Arina Faila Saufa⁴

**Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia¹*

***Universitas Islam Malang, Indonesia^{2,3}*

**Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta⁴*

Korespondensi: nizamrifqi@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Perpustakaan akademik tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga memiliki potensi sebagai ruang publik yang mendorong budaya diskusi kritis di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA dalam membangun budaya diskusi kritis mahasiswa melalui perspektif teori ruang publik Jürgen Habermas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap empat mahasiswa aktif yang dipilih secara purposif karena keterlibatannya dalam aktivitas diskusi di perpustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi, kategorisasi, dan interpretasi berdasarkan tujuh indikator ruang publik Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator akses terbuka, kebebasan berpendapat, dan independensi dari dominasi telah terimplementasi dengan cukup baik, namun indikator dialog kritis, kesetaraan partisipasi, orientasi pada kepentingan umum, serta fungsi simbolik perpustakaan sebagai ruang diskursus masih belum optimal. Temuan ini menegaskan perlunya strategi kolaboratif antara pustakawan, dosen, dan mahasiswa untuk mengembangkan ruang diskusi yang lebih inklusif, aktif, dan berkelanjutan di lingkungan perpustakaan akademik.

Kata Kunci: Perpustakaan Akademik, Budaya Diskusi Kritis, Ruang Publik, Teori Habermas

THE ROLE OF ACADEMIC LIBRARIES IN FOSTERING A CULTURE OF CRITICAL DISCUSSION: A PUBLIC SPHERE PERSPECTIVE OF HABERMAS (A CASE STUDY AT UNISMA)

ABSTRACT

Academic libraries are not only centers for information access but also hold the potential to function as public spheres that foster a culture of critical discourse within higher education. This study aims to examine the role of the Library and Archives of UNISMA in cultivating critical discussion among students through the theoretical framework of Jürgen Habermas's public sphere. Employing a qualitative descriptive approach and case study design, data were collected from four purposively selected active students engaged in library-based discussion activities. Data collection techniques included semi-structured interviews, participant observation, and documentation. Thematic analysis was conducted through data reduction, categorization, and interpretation guided by seven key indicators of Habermas's public sphere theory. Findings reveal that indicators such as open access, freedom of expression, and independence from political and economic domination are relatively well-practiced. However, indicators like critical-rational discourse, equal participation, orientation toward public interest, and the symbolic role of the library as a discourse space remain underdeveloped. These results underscore the need for collaborative strategies involving librarians, faculty, and students to enhance the library's role as a more inclusive, dynamic, and sustained platform for academic dialogue.

Keyword: Academic Library, Critical Discussion Culture, Public Sphere, Habermas's Theory



Riwayat Artikel

1. Diterima : 5 Agustus 2025
2. Disetujui : 29 September 2025
3. Dipublikasikan : 30 September 2025



Copyright©2019

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan komponen akademik penting dalam institusi pendidikan tinggi yang berperan sebagai pusat penyimpanan buku, sumber informasi, sekaligus tempat aktivitas intelektual siswa. Perpustakaan memiliki peran penting dalam mendukung dunia pendidikan khususnya terkait literasi masyarakat (Naharuddin, Syahdan, Pare Allo, K., Ismaya, & Akbar, 2025). Pada perkembangannya perpustakaan akademik di berbagai perguruan tinggi kini mengalami transformasi dari fungsi tradisionalnya menjadi ruang interaksi sosial yang mendorong terjadinya pertukaran gagasan secara kritis dan demokratis (Mensah, I. & Onyancha, 2021). Perpustakaan memungkinkan pemustaka khususnya mahasiswa untuk mengakses berbagai jenis informasi yang diperlukan dalam proses belajar dan penelitian mereka (Indriani et al., 2024). Adetayo et al., (2023) Menyoroti bahwa evolusi perpustakaan akademik dalam lingkungan pendidikan kontemporer menunjukkan perubahan dari peran tradisional sebagai penyimpan informasi menjadi pusat interaksi sosial, kolaborasi, dan pembelajaran yang dinamis dan partisipatif seperti pertukaran ide dan proyek kolaboratif, di mana siswa dapat terlibat dalam diskusi yang kritis dan demokratis tentang berbagai topik (Nasrullah et al., 2024). Fenomena tersebut semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran sivitas akademika tentang pentingnya perpustakaan sebagai ruang publik akademik yang inklusif dan interaktif.

Budaya diskusi kritis merupakan elemen penting dalam proses pendidikan tinggi karena dapat mengasah kemampuan mahasiswa untuk berpikir analitis, rasional, serta terbuka terhadap berbagai sudut pandang (Budiyanto & Ridho, 2024). Studi yang dilakukan oleh Xu et al., ditemukan bahwa mahasiswa yang terbiasa berdiskusi secara kritis cenderung mampu menyelesaikan permasalahan secara efektif, memiliki wawasan luas, serta memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosialnya (Xu et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan budaya diskusi kritis perlu menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan akademik yang progresif dan inovatif dan sangat penting dalam mempertahankan sudut pandang yang terbuka terhadap beragam informasi (Gjerazi, 2024).

Habermas (2022) Mengemukakan bahwa ruang publik ideal adalah ruang yang terbuka, inklusif, bebas dari dominasi politik maupun ekonomi, serta memungkinkan terjadinya diskursus rasional antarpeserta. Rauchfleisch (2017) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa ruang publik merupakan arena interaksi bebas di mana individu dapat bertukar gagasan tanpa tekanan dari kekuatan dominan. Fraser (2020) kemudian memperluas gagasan tersebut menjadi konsep ruang publik transnasional, yang menekankan pentingnya keberagaman pandangan dan partisipasi inklusif lintas batas sosial dan geografis. Dalam

konteks perpustakaan akademik, teori ruang publik menjadi sangat relevan karena perpustakaan berpotensi menjadi ruang yang mendukung diskusi setara, penyebaran informasi tanpa diskriminasi, serta terbukanya akses bagi seluruh sivitas akademika untuk menyampaikan gagasan secara rasional. Sebagai contoh konkret, forum ilmiah terbuka, bedah buku lintas jurusan, dan layanan informasi berbasis akses terbuka merupakan wujud nyata dari ruang publik Habermasian di lingkungan perpustakaan. Sejalan dengan hal ini, Andini & Fuady (2024) menegaskan bahwa perpustakaan akademik dapat menjadi medium representatif bagi terbentuknya ruang diskursus publik yang demokratis, selama perpustakaan mampu mengelola fungsinya secara inklusif dan deliberatif.

Meskipun perpustakaan akademik secara konseptual diharapkan menjadi ruang intelektual yang mendorong budaya diskusi kritis di kalangan mahasiswa, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan antara fungsi ideal tersebut dengan praktik aktual. Hasil observasi awal di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA menunjukkan bahwa meskipun tersedia berbagai fasilitas seperti ruang baca, ruang diskusi, dan akses informasi digital, pemanfaatannya untuk aktivitas diskusi kritis masih sangat terbatas. Aktivitas yang bersifat dialogis seperti seminar, forum diskusi, atau bedah buku belum menjadi bagian yang rutin dan sistematis dari kehidupan perpustakaan, dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan tersebut pun cenderung rendah. Selain itu, keterlibatan dosen dan pustakawan dalam membangun kolaborasi akademik yang mampu merangsang diskursus kritis masih belum optimal. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya strategi promosi dan komunikasi perpustakaan dalam menginformasikan program-program intelektual kepada mahasiswa. Padahal, di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi di era digital, kebutuhan akan ruang-ruang dialog yang kritis dan reflektif menjadi semakin mendesak. Namun demikian, belum terdapat kajian komprehensif yang secara eksplisit mengevaluasi bagaimana perpustakaan akademik menjalankan peran tersebut, khususnya dalam konteks budaya diskusi kritis mahasiswa. Kekosongan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) penting untuk ditelaah secara sistematis.

Dalam menjawab gap tersebut, teori ruang publik yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas menjadi lensa teoritis yang relevan dan signifikan. Habermas menekankan pentingnya adanya ruang di mana individu dapat berdiskusi secara rasional, setara, bebas dari dominasi politik maupun ekonomi, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks pendidikan tinggi, perpustakaan akademik memiliki potensi untuk mewujudkan ruang publik semacam ini, di mana mahasiswa tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga membentuk dan membagikan opini secara kritis dalam suasana yang terbuka dan demokratis. Perspektif

Habermasian ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai tersedianya fasilitas diskusi secara fisik, tetapi juga menilai kualitas relasi sosial, dinamika komunikasi, serta pola partisipasi intelektual yang terjadi di dalam ruang perpustakaan (Fuchs, 2021). Oleh karena itu, penerapan teori ruang publik Habermas dalam penelitian ini menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA dapat menjalankan fungsinya sebagai ruang diskursus akademik yang mendorong terbentuknya budaya diskusi kritis di kalangan mahasiswa secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur ketercapaian indikator ruang publik Habermas dalam praktik perpustakaan, serta merumuskan strategi penguatan peran perpustakaan akademik sebagai ruang publik di lingkungan perguruan tinggi.

B. KAJIAN TERDAHULU

Konsep perpustakaan sebagai ruang publik telah menjadi isu penting, kini perpustakaan juga berperan dalam menciptakan ruang untuk inovasi dan kreativitas masyarakat (Kawamoto & Koizumi, 2022). Hal tersebut ditunjang dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan ruang-ruang diskursus yang lebih demokratis, berbagai penelitian telah mencoba menjelaskan bagaimana perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, bertransformasi menjadi ruang publik yang mendukung budaya diskusi kritis, partisipasi intelektual, dan kebebasan berekspresi. Berikut ini diuraikan secara sistematis tiga kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Qomariyah, A. N., & Rahmi, (2017) yang berjudul *"Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Ruang Publik: Kajian Wifi Zone Corner di Perpustakaan ITS"*. Penelitian ini menyoroti transformasi ruang Wifi Zone Corner di Perpustakaan ITS sebagai bentuk nyata perpustakaan fisik yang membuka diri sebagai ruang publik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa perubahan desain ruang, penyelenggaraan forum publik secara rutin, serta kemitraan dengan lembaga eksternal berhasil menciptakan suasana yang terbuka, nyaman, dan mendukung interaksi antar pengunjung. Kelebihan dari studi ini adalah fokusnya pada praktik empiris konkret yang mencerminkan keberhasilan perpustakaan dalam mengelola ruang fisik sebagai ruang publik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada sisi analisis teoritis—belum mengaitkan temuan dengan indikator ruang publik Habermas secara mendalam. Penelitian ini menjadi dasar penting bahwa keberadaan ruang diskusi fisik di perpustakaan dapat difungsikan secara optimal untuk mewadahi budaya diskursus mahasiswa.

Kajian kedua adalah karya Prasetyo (2022) dalam artikelnya *"Disruption of Libraries as Public Spaces: Dissecting Jurgen Habermas's Thoughts and Digital Public Spaces"*. Kajian ini

menggunakan pendekatan kepustakaan naratif-deskriptif untuk membedah pemikiran Habermas dalam konteks disrupsi ruang publik digital. Prasetyo menyoroti bagaimana rasionalitas komunikatif yang menjadi basis ruang publik Habermas mengalami distorsi akibat dominasi teknologi dan banjir informasi di era digital. Perpustakaan, menurut penulis, menghadapi dilema antara mempertahankan marwahnya sebagai ruang publik yang membebaskan, dan kebutuhan adaptasi terhadap dunia digital yang cenderung mereduksi kualitas komunikasi menjadi konsumsi informasi dangkal. Kelebihan kajian ini terletak pada kedalaman telaah konseptual terhadap teori Habermas dan aplikasinya dalam realitas digital kontemporer. Namun, penelitian ini tidak menyajikan data lapangan atau praktik perpustakaan secara langsung. Meskipun demikian, artikel ini memberi landasan teoritis kritis yang penting bagi penelitian ini, terutama dalam memahami tantangan dehumanisasi ruang publik dan pentingnya perpustakaan tetap menjaga fungsi komunikatif yang egaliter dan rasional serta dalam konteks penelitian ini akan disajikan bagaimana praktik di lapangan secara langsung.

Kajian ketiga berasal dari [Istiarni, A., & Kurniasari \(2020\)](#) dalam artikelnya "*Peran Perpustakaan Digital dalam Menciptakan Ruang Publik: Studi Kasus Perpustakaan Digital Universitas Lampung*". Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat informasi memaknai ruang publik digital, serta bagaimana perpustakaan digital Universitas Lampung membentuk ruang publik maya. Penelitian ini berpijak pada teori ruang publik Habermas dan Lefebvre serta memperkenalkan lima indikator ruang publik ideal: kemudahan akses, kebebasan berekspresi, kesetaraan, kepastian hukum, dan komitmen bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan digital Unila telah menyediakan akses terbuka melalui aplikasi mobile dan layanan daring, namun tantangan masih muncul dalam bentuk keterbatasan akses konten, perlindungan hak cipta, dan rendahnya literasi digital pengguna. Kelebihan studi ini terletak pada adaptasi konkret teori Habermas ke dalam ruang publik digital berbasis pengguna. Kekurangannya adalah belum mendalamnya pembahasan tentang faktor-faktor struktural yang menghambat inklusivitas ruang diskursus digital. Studi ini penting karena menyediakan indikator konseptual yang dapat dijadikan alat analisis untuk mengevaluasi apakah ruang fisik maupun digital di perpustakaan benar-benar mendukung fungsi ruang publik secara ideal.

Ketiga penelitian tersebut secara umum mengafirmasi bahwa perpustakaan, baik secara fisik maupun digital, memiliki potensi untuk berperan sebagai ruang publik. Namun, tantangan seperti regulasi teknis, kesenjangan akses literasi, serta degradasi kualitas komunikasi akibat digitalisasi menjadi kendala yang belum terselesaikan sepenuhnya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menyempurnakan dan mengembangkan kajian sebelumnya dengan

mengintegrasikan pendekatan teoritis Habermas secara sistematis ke dalam konteks empirik Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek akses dan fasilitas, tetapi juga mengeksplorasi secara mendalam dimensi komunikasi rasional, kebebasan berpendapat, kesetaraan partisipasi, dan simbolisme ruang diskursus. Secara eksplisit, penelitian ini akan mengevaluasi tujuh indikator ruang publik Habermas melalui teknik analisis tematik terhadap data wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna mengukur sejauh mana prinsip-prinsip ruang publik tersebut terejawantah dalam praktik diskusi kritis di lingkungan perpustakaan akademik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang publik demokratis di era kontemporer.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. [Bradshaw et al. \(2017\)](#) Dikatakan bahwa pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara mendalam terhadap fenomena tertentu ([Sugiyono, 2022](#)). Konteks penelitian ini yaitu terkait dengan peran perpustakaan akademik dalam membentuk budaya diskusi kritis di kalangan mahasiswa melalui perspektif teori ruang publik Habermas. Lokasi penelitian dilakukan secara khusus di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA.

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa sebagai pemustaka Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak empat mahasiswa aktif sebagai pemustaka di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA. Kriteria pemilihan informan mahasiswa ditetapkan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif mereka dalam pemanfaatan ruang-ruang perpustakaan sebagai wadah interaksi intelektual. Informan yang dipilih merupakan mahasiswa UNISMA yang secara rutin memanfaatkan ruang diskusi, ruang literasi, atau ruang baca terbuka yang tersedia di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA. Selain itu, mereka pernah terlibat dalam kegiatan diskusi baik secara formal maupun informal, seperti seminar, bedah buku, forum kajian, atau kelompok belajar yang difasilitasi oleh perpustakaan. Informan juga diharapkan mampu merefleksikan pengalaman personal maupun sosialnya dalam menggunakan ruang perpustakaan sebagai tempat pertukaran gagasan dan diskursus kritis. Sedangkan objek penelitian ini adalah peran Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA sebagai ruang publik akademik dalam membentuk budaya diskusi kritis.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian terkait peran perpustakaan dalam membangun budaya diskusi kritis. [Sugiyono \(2022\)](#) Menjelaskan

pelaksanaan observasi partisipatif dengan mengamati secara langsung aktivitas yang berlangsung di perpustakaan, khususnya pada kegiatan diskusi mahasiswa seperti seminar dan forum diskusi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan berupa dokumen kebijakan perpustakaan, laporan kegiatan, arsip diskusi, dan dokumentasi visual lainnya yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tematik, serta interpretasi berdasarkan indikator teori ruang publik Habermas seperti akses terbuka, kebebasan berpendapat, dialog kritis, kesetaraan, dan orientasi terhadap kepentingan umum (Duvenage, 2018). Keabsahan data dipastikan menggunakan triangulasi metode dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi sumber melalui konfirmasi antar informan untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap empat informan, observasi partisipatif, serta dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA telah menunjukkan peran signifikan sebagai ruang publik akademik. Sejumlah indikator ruang publik Habermas seperti akses terbuka, kebebasan berpendapat, dialog kritis, serta kesetaraan partisipasi relatif terwujud dalam praktik, meskipun dengan kualitas yang bervariasi. Mahasiswa mengakui bahwa perpustakaan memberi ruang netral bagi mereka untuk berinteraksi, berdiskusi, dan mengembangkan argumentasi rasional di luar ruang kelas formal.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural mencakup keterbatasan fasilitas fisik dan teknologi yang belum sepenuhnya mendukung diskursus kritis, sedangkan hambatan kultural terlihat dari masih lemahnya budaya akademik mahasiswa dalam mengartikulasikan gagasan kritis. Kedua hambatan ini membuat fungsi diskursif perpustakaan belum optimal dalam membentuk budaya diskusi kritis yang konsisten dan berkelanjutan.

Di sisi lain, terdapat peluang strategis untuk memperkuat fungsi perpustakaan sebagai ruang publik akademik. Potensi perpustakaan sebagai ruang netral, integrasi kegiatan literasi dengan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi digital memberikan basis yang kuat untuk memperluas cakupan dan kualitas diskursus.

1. Akses Terbuka (*Open Access*)

Salah satu temuan utama dari wawancara terhadap 4 informan adalah bahwa Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA pada dasarnya telah menyediakan akses yang

terbuka dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika. Informan menilai bahwa mereka bebas mengakses ruang baca, ruang literasi, hingga fasilitas digital seperti OPAC, *repository*, dan *e-book* tanpa hambatan berarti. Namun demikian, muncul catatan penting terkait beberapa kendala teknis dan regulatif, terutama dalam hal prosedur peminjaman ruang diskusi dan keterbatasan jam operasional perpustakaan yang hanya buka hingga sore hari. Informan satu dan tiga, misalnya, menyoroti keterbatasan waktu operasional yang dinilai terlalu singkat, menurut Iman, “Perpustakaan adalah tempat buat temen-temen bisa berdiskusi, baca buku, belajar kelompok itu ada limit waktunya di perpustakaan ini. Perpustakaan buka sampai jam 15.30 pun menurut saya kurang, soalnya di perpustakaan yang lainnya ada yang buka sampai malam di pekan UTS atau UAS. Kalau di daily perkuliahan menurut saya hanya sampai sore saja cukup”, serta prosedur birokratis peminjaman ruang yang dirasa menyulitkan bagi mahasiswa. Meski akses informasi bersifat terbuka, “Untuk perihal fasilitas ruang diskusi saya pernah mencoba ingin pinjam di semester 1 dulu, saat saya belum memiliki laptop sendiri, waktu itu saya lihat ada fasilitas perpustakaan yang menyediakan komputer, baik di lantai 1 dan lantai 2, tapi Ketika saya minta izin untuk menggunakannya dengan tujuan mengerjakan tugas, petugas bilang bahwa komputer itu tidak bisa digunakan karena sedang diperbaiki” ujarnya. Tetapi akses terhadap ruang diskusi fisik masih dihadapkan pada hambatan administratif dan waktu.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengevaluasi apakah prinsip keterbukaan akses sebagaimana yang dikemukakan oleh Habermas telah terpenuhi dalam praktik perpustakaan sebagai ruang publik (Habermas, 2022). Dalam teorinya, Habermas menekankan bahwa ruang publik yang ideal harus menjamin akses yang setara dan terbuka bagi seluruh warga tanpa diskriminasi atau hambatan struktural. Jika diterapkan pada konteks perpustakaan akademik, maka seluruh mahasiswa seharusnya dapat menggunakan fasilitas diskusi dengan mudah, fleksibel, dan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, prinsip dasar keterbukaan akses dalam ruang publik Habermasian secara umum telah tercermin dalam layanan dan kebijakan Perpustakaan UNISMA, terutama dalam ketersediaan ruang dan kemudahan akses digital. Namun, terdapat kesenjangan antara akses potensial dan akses aktual, di mana keterbukaan yang sudah tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan jam layanan, promosi yang minim, serta kurangnya fleksibilitas prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan tidak hanya soal "tersedianya fasilitas", tetapi juga menyangkut bagaimana akses tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pengguna (Ushkin, 2024).

Implikasinya, Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA perlu meninjau ulang kebijakan teknis terkait peminjaman ruang, memperpanjang jam operasional terutama pada masa

ujian atau kegiatan intensif mahasiswa, serta meningkatkan diseminasi informasi tentang fasilitas diskusi kepada pengguna. Sejalan dengan (Piromalli, 2024) upaya ini penting agar prinsip keterbukaan akses tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi benar-benar terwujud dalam pengalaman mahasiswa sebagai pengguna perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan dapat secara nyata berfungsi sebagai ruang publik yang inklusif dan demokratis sesuai dengan idealitas Habermas.

2. Kebebasan Berpendapat (*Freedom of Expression*)

Hasil wawancara terhadap keempat informan menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa merasa bebas menyampaikan pendapat dan berdiskusi di lingkungan Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA. Keempat informan menyatakan tidak pernah mengalami intervensi, pelarangan, atau batasan topik saat berdiskusi di perpustakaan. Diskusi yang dilakukan dianggap berlangsung secara natural dan aman, selama tetap menjaga adab dan tidak mengganggu pemustaka lain. Informan juga menilai bahwa pustakawan bersikap terbuka dan tidak membatasi konten diskusi, selama diskusi berjalan dalam batas kewajaran. Meski demikian, beberapa informan mencatat bahwa belum ada sosialisasi atau rambu-rambu yang jelas mengenai area yang diperbolehkan untuk berdiskusi secara bebas, sehingga mahasiswa terkadang ragu untuk berdiskusi secara intens.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk menilai sejauh mana prinsip kebebasan berpendapat dalam ruang publik Habermas tercermin dalam aktivitas diskusi di perpustakaan akademik. Dalam konsep ruang publik yang ideal, Habermas menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, rasional, dan tanpa rasa takut akan pembatasan atau sanksi (Habermas, 2022). Kebebasan ini merupakan dasar dari proses deliberatif dalam demokrasi, yang juga dapat diterjemahkan dalam konteks mikro seperti institusi pendidikan (Duvenage, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa aspek kebebasan berpendapat telah terimplementasi secara cukup baik di Perpustakaan UNISMA. Tidak ada larangan topik, dan sikap pustakawan terhadap diskusi bersifat permisif. Namun, kebebasan ini masih lebih bersifat implisit berasal dari tidak adanya larangan daripada didukung oleh regulasi atau kebijakan yang secara aktif melindungi dan mendorong ekspresi kritis. Artinya, meskipun tidak ada pembatasan langsung, tidak ada pula dukungan aktif yang memfasilitasi atau memotivasi ekspresi pendapat yang kritis dan mendalam.

Implikasinya, pihak perpustakaan perlu memperjelas ruang-ruang mana saja yang memang diperuntukkan sebagai area diskusi bebas, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya diskursus terbuka dan kritis sebagai bagian dari budaya akademik. Selain itu, pustakawan dapat lebih berperan sebagai fasilitator yang mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan intelektual berbasis diskusi. Dengan langkah-langkah tersebut, perpustakaan tidak hanya menjadi ruang yang membolehkan kebebasan berpendapat, tetapi juga ruang yang mendorong dan merawatnya, sebagaimana prinsip ideal ruang publik dalam pandangan Habermas (Warner, 2013).

3. Dialog Kritis dan Rasional (*Critical and Rational Discourse*)

Wawancara terhadap keempat informan menunjukkan bahwa aktivitas diskusi kritis dan rasional di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA masih berlangsung dalam skala terbatas. Informan satu dan dua mengakui bahwa sebagian besar mahasiswa datang ke perpustakaan untuk mengerjakan tugas atau mencari suasana belajar yang tenang, sementara diskusi yang terjadi cenderung bersifat ringan dan tidak mendalam. Informan tiga menyampaikan bahwa diskusi serius lebih sering dilakukan di kelas, bukan di perpustakaan, meskipun ia mengetahui bahwa beberapa komunitas seperti Duta Perpustakaan dan organisasi mahasiswa pernah menyelenggarakan diskusi bersifat akademik di sana. Sementara itu, informan empat menjelaskan bahwa diskusi yang ia ikuti kadang sudah mengarah ke bentuk argumentatif dengan referensi pustaka, namun kualitasnya masih bercampur antara opini subjektif dan pendapat berbasis data.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menilai sejauh mana perpustakaan telah menjadi ruang yang mendorong terjadinya diskursus kritis dan rasional di kalangan mahasiswa (Habermas, 2022). Dalam teori Habermas, ruang publik yang ideal tidak hanya menjamin kebebasan berbicara, tetapi juga mengutamakan kualitas komunikasi yang berbasis pada argumen, logika, dan pertukaran rasional antar peserta (Bakardjieva, 2024). Sebagaimana diungkapkan oleh (Warner, 2013) bahwa diskusi semacam ini menjadi fondasi deliberasi publik yang sehat dan menciptakan konsensus intelektual yang reflektif.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa potensi untuk terjadinya dialog kritis di perpustakaan sudah ada baik dari sisi ruang, fasilitas, maupun sejumlah kegiatan yang pernah difasilitasi. Pada data tahun 2024 UNISMA memiliki jumlah mahasiswa sekitar 17.000 orang, dan mahasiswa yang aktif sebagai anggota Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA sebanyak 2.000 orang. Namun dalam praktiknya, diskusi kritis dan rasional belum menjadi budaya dominan. Diskusi masih bersifat insidental, tidak

terorganisasi secara sistematis, dan belum didukung oleh mekanisme institusional seperti forum akademik rutin, komunitas pembaca, atau kelompok studi berbasis referensi. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan UNISMA belum sepenuhnya memenuhi dimensi rasionalitas diskursus dalam teori ruang publik Habermas.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya inisiatif strategis dari pihak perpustakaan untuk menginisiasi atau memfasilitasi kegiatan yang mengedepankan dialog akademik berbasis data dan referensi. Jumlah kegiatan diskusi resmi (seminar, bedah buku, forum ilmiah mahasiswa) yang diselenggarakan di Perpustakaan UNISMA rata-rata hanya 2–3 kegiatan per semester. Kegiatan tersebut dapat menjadi katalisator untuk menghidupkan kembali praktik diskursus rasional. Selain itu, kolaborasi dengan dosen dan organisasi mahasiswa juga penting untuk memperkuat nilai ilmiah dalam interaksi antar mahasiswa di ruang perpustakaan. Dengan demikian, perpustakaan dapat berperan tidak hanya sebagai tempat bertukar pendapat, tetapi juga sebagai arena pembentukan nalar kritis yang terstruktur dan berorientasi pada pencapaian konsensus intelektual yang rasional (Duvenage, 2018).

4. Kesetaraan dalam Partisipasi (*Equality in Participation*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan, dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa UNISMA memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas diskusi di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA. Informan satu, dua dan tiga menegaskan bahwa tidak ada batasan latar belakang jurusan, angkatan, atau kelompok tertentu dalam mengakses ruang diskusi dan terlibat dalam aktivitas akademik di perpustakaan. Informan Iman juga menyebutkan bahwa pernah ada kegiatan kolaboratif yang melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan, seperti kegiatan Duta Kampus, PMII, atau fakultas tertentu. Namun demikian, sebagian informan mengamati adanya kecenderungan bahwa kelompok tertentu, seperti organisasi mahasiswa atau fakultas tertentu (misalnya FAI dan Hukum), lebih sering memanfaatkan ruang diskusi dibandingkan mahasiswa lainnya. Hal ini bukan karena eksklusivitas akses, melainkan karena minimnya informasi dan promosi dari pihak perpustakaan mengenai prosedur peminjaman ruang dan fasilitas diskusi.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk menilai sejauh mana prinsip kesetaraan partisipasi dalam ruang publik Habermas dipersonifikasikan di perpustakaan akademik (Habermas, 2022). Menurut Habermas, ruang publik yang ideal mensyaratkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam diskursus tanpa adanya

hambatan struktural, diskriminasi sosial, atau dominasi kelompok tertentu (Knapp, 2013). Dalam konteks perpustakaan, prinsip ini menuntut adanya jaminan akses dan partisipasi diskusi secara inklusif bagi seluruh mahasiswa, tanpa memandang latar belakang akademik maupun sosial.

Berdasarkan temua penelitian, dapat dikatakan bahwa kesetaraan formal dalam partisipasi sudah tercipta setiap mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas diskusi. Namun, kesetaraan substantif belum sepenuhnya terwujud karena ada ketimpangan partisipasi yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, informasi teknis, dan promosi aktif dari pihak perpustakaan. Mahasiswa yang memiliki inisiatif tinggi atau tergabung dalam organisasi lebih sering memanfaatkan ruang diskusi, sementara mahasiswa umum cenderung pasif karena tidak tahu cara atau prosedur untuk mengakses fasilitas tersebut.

Implikasinya, perpustakaan perlu melakukan pemberdayaan partisipatif, tidak hanya menyediakan fasilitas diskusi, tetapi juga aktif mengajak dan membina seluruh kalangan mahasiswa agar merasa diikutsertakan. Ini bisa dilakukan melalui kerja sama dengan fakultas, BEM, maupun himpunan mahasiswa untuk membuka kanal komunikasi yang efektif, serta dengan menyederhanakan prosedur akses dan memperbanyak kanal informasi (termasuk media sosial). Dengan langkah ini, perpustakaan tidak hanya menyediakan ruang yang terbuka, tetapi juga memastikan bahwa seluruh mahasiswa merasa diundang dan berhak untuk terlibat secara aktif dalam diskursus akademik yang berlangsung.

5. Bebas dari Dominasi dan Politik Ekonomi (*Independence from Political and Economic Domination*)

Berdasarkan wawancara terhadap keempat informan, dapat disimpulkan bahwa diskusi-diskusi yang berlangsung di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA umumnya terbebas dari pengaruh politik, ekonomi, atau kepentingan eksternal lainnya. Empat informan secara konsisten menyatakan bahwa selama mereka terlibat dalam kegiatan di perpustakaan, mereka tidak pernah merasakan tekanan, intervensi, ataupun batasan dari organisasi kampus, sponsor, atau pihak universitas dalam menentukan tema atau isi diskusi. Bahkan, ketika topik yang dibahas bersifat sensitif, para informan meyakini bahwa perpustakaan tidak membatasi sejauh pembahasan tersebut tidak melanggar norma dan etika yang berlaku di lingkungan akademik.

Meskipun wawancara menunjukkan tidak adanya intervensi politik maupun ekonomi, kondisi ini tidak serta merta menandakan kebebasan diskursus telah terjamin

secara substantif. Sebagaimana dikemukakan Fraser (1992) dan Dahlberg (2001), independensi ruang publik perlu ‘diuji’ melalui intensitas, keragaman, dan bahkan benturan klaim yang muncul dalam diskursus. Dalam konteks UNISMA, minimnya diskusi terbuka justru membuat independensi tersebut belum benar-benar teruji, sehingga potensi intervensi atau dominasi di masa depan tidak dapat dipastikan sepenuhnya.” Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menilai apakah perpustakaan sebagai ruang publik telah mampu memisahkan dirinya dari kepentingan kekuasaan politik atau dominasi ekonomi, sebagaimana dipersyaratkan dalam teori ruang publik Habermas (Habermas, 2022). Dalam kerangka tersebut, diskursus publik yang ideal harus berlangsung secara otonom, tidak diarahkan oleh kepentingan institusional, sponsor, atau kelompok elite tertentu, sehingga memungkinkan terbentuknya opini publik yang murni dari nalar kolektif warga (Kellner, 2024).

Berdasarkan data lapangan, prinsip independensi dari kekuasaan eksternal relatif telah terpenuhi di lingkungan perpustakaan UNISMA. Tidak terdapat dominasi atau pengaruh eksternal yang mengintervensi proses diskusi mahasiswa. Namun informan dua dan tiga menekankan bahwa kebebasan ini lebih karena rendahnya intensitas diskusi daripada karena adanya pengaturan yang menjamin independensi tersebut. Dengan kata lain, belum cukup ruang dialektika yang “menguji” batas independensi itu sendiri karena diskusi kritis masih minim dilakukan secara rutin dan terbuka.

Implikasinya, meskipun tidak ditemukan dominasi politik atau ekonomi, perpustakaan tetap perlu memperkuat jaminan independensi diskursus melalui kebijakan internal, misalnya dengan menyediakan ruang diskusi terbuka yang secara eksplisit bersifat non-intervensi, serta memberi ruang kepada mahasiswa untuk menyelenggarakan forum-forum independen tanpa harus terafiliasi pada kepentingan tertentu. Carriquiry (2022) Memperkuat jaminan independensi Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi perpustakaan sebagai ruang netral dan otonom, tetapi juga menjadi landasan yang kokoh dalam mendorong diskursus publik yang reflektif dan emansipatoris sebagaimana diidealkan oleh Habermas.

6. Orientasi Pada Kepentingan Umum (*Orientation Toward Public Good*)

Wawancara terhadap keempat informan menunjukkan bahwa diskusi yang berlangsung di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA umumnya berorientasi pada kepentingan akademik dan intelektual bersama, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Informan satu dan dua menilai bahwa diskusi yang pernah mereka ikuti,

seperti bedah buku karya dosen, lebih mengedepankan nilai-nilai akademik yang bersifat terbuka dan inklusif. Informan satu menyampaikan bahwa meskipun diskusi belum berlangsung secara masif, tema-tema yang muncul cenderung bersifat akademik dan reflektif, bukan politis atau sektarian. Sementara itu, informan empat menyatakan bahwa orientasi diskusi sangat bergantung pada individu yang terlibat, namun secara umum tetap diarahkan pada peningkatan kapasitas intelektual dan literasi informasi mahasiswa.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menilai apakah kegiatan diskusi di perpustakaan telah mencerminkan orientasi pada kepentingan umum sebagaimana diidealkan dalam teori ruang publik Habermas (Habermas, 2022). Dalam kerangka Habermas, ruang publik ideal seharusnya menjadi arena pembentukan opini yang rasional dan berorientasi pada kebaikan bersama (*common good*), bukan sekadar memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Diskursus yang terjadi di dalamnya harus mengarah pada pemahaman bersama atas isu-isu publik, bukan pada fragmentasi kepentingan (Duvenage, 2018).

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa orientasi pada kepentingan umum telah cukup terwakili dalam berbagai aktivitas yang berlangsung di perpustakaan. Namun, upaya tersebut masih bersifat insidental dan belum difasilitasi secara strategis dan terstruktur. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan diskusi yang bersifat publik juga belum tersampaikan secara merata ke seluruh sivitas akademika. Beberapa informan mencatat bahwa mahasiswa masih cenderung memandang perpustakaan hanya sebagai tempat belajar individu atau peminjaman buku, bukan sebagai ruang diskusi publik yang aktif.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun orientasi diskusi di Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA cenderung mengarah pada kepentingan akademik dan intelektual bersama, sifatnya masih insidental dan belum bertransformasi menjadi strategi kelembagaan. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah keterbatasan sumber daya pustakawan dalam merancang dan memfasilitasi program diskusi secara rutin. Pustakawan lebih banyak berfokus pada layanan teknis dan administratif dibandingkan pada fungsi pengembangan ruang publik.

Selain itu, minimnya kolaborasi antar fakultas juga membuat orientasi kepentingan umum tidak berkembang masif. Diskusi seringkali terfokus pada lingkup program studi tertentu, sehingga potensi pertukaran gagasan lintas disiplin tidak optimal. Faktor lain adalah absennya insentif bagi mahasiswa untuk terlibat. Tanpa pengakuan akademik, penghargaan, atau dukungan formal dari fakultas, mahasiswa cenderung menempatkan

diskusi di perpustakaan sebagai aktivitas tambahan, bukan kebutuhan inti dalam pembentukan kapasitas intelektual.

Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya strategi konkret yang mampu menggeser diskusi dari aktivitas insidental menjadi agenda reguler perpustakaan. Misalnya, perpustakaan dapat bekerja sama dengan BEM universitas untuk menyelenggarakan Forum Lintas Fakultas yang membahas isu-isu aktual nasional seperti etika digital, kebijakan pendidikan tinggi, atau krisis lingkungan. Selain itu, diskusi tematik dapat dirancang agar relevan langsung dengan kebutuhan mahasiswa, seperti forum refleksi kurikulum MBKM, kajian buku teks yang digunakan lintas prodi, atau diskusi kebijakan publik yang sedang hangat. Dengan demikian, perpustakaan akan lebih diakui sebagai pusat pembentukan opini rasional dan konsensus intelektual, sesuai dengan cita-cita ruang publik Habermas.

Perpustakaan juga perlu meningkatkan Kerjasama dengan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dan fakultas atau program studi untuk kegiatan promosi program-program yang berorientasi pada penguatan kepentingan umum, misalnya dengan memperluas kegiatan diskusi terbuka lintas fakultas, mengadakan forum ilmiah yang membahas isu-isu sosial dan akademik aktual, serta menjalin kerja sama dengan komunitas kampus seperti himpunan mahasiswa dan organisasi akademik. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga berfungsi sebagai arena pembentukan konsensus kolektif yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dan intelektual yang inklusif, sebagaimana ditekankan dalam teori ruang publik Habermas (Kleinschmit, 2012).

7. Ruang Fisik dan Simbolik Sebagai Tempat Diskursus (*Physical and Symbolic Space for Discourse*)

Wawancara dengan empat informan menunjukkan bahwa Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA secara umum telah menyediakan fasilitas fisik yang memadai untuk menunjang aktivitas diskusi akademik, seperti ruang diskusi kecil, ruang literasi, area lesehan, dan ballroom. Informan satu, tiga, dan empat sepakat bahwa secara fisik, ruang diskusi yang tersedia cukup nyaman dan mendukung lengkap dengan fasilitas seperti AC, LCD proyektor, dan koneksi internet. Namun demikian, beberapa kekurangan masih dirasakan, seperti regulasi peminjaman ruang yang dianggap menyulitkan, jam operasional yang terbatas, dan kurangnya ventilasi atau kenyamanan di beberapa area. Selain itu, beberapa sarana teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal karena promosi atau sosialisasinya minim, sebagaimana disampaikan oleh informan Syafrila dan Iman.

Secara simbolik, perpustakaan belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai pusat diskursus akademik oleh mahasiswa. Mayoritas informan menyatakan bahwa meskipun

fasilitas telah tersedia, perpustakaan belum menjadi simbol atau ikon utama budaya diskusi di kalangan mahasiswa UNISMA. Banyak mahasiswa masih menganggap perpustakaan hanya sebagai tempat membaca dan mengerjakan tugas, bukan ruang dialog atau refleksi kolektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi kegiatan diskusi, minimnya keterlibatan organisasi mahasiswa, serta kurangnya sinergi antara pustakawan dan akademisi dalam memantik budaya diskursus.

Dalam teori Habermas, ruang publik tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung makna simbolik sebagai arena pembentukan wacana rasional yang diakui oleh masyarakat (Habermas, 2022). Dengan demikian, perpustakaan yang berperan sebagai ruang publik tidak cukup hanya menyediakan ruang secara fisik, melainkan juga harus membentuk persepsi sosial bahwa ia merupakan ruang sah untuk berpendapat, berdialog, dan membentuk kesadaran kolektif (Piromalli, 2024). Di sinilah pentingnya strategi place-making atau academic branding. Perpustakaan perlu dikelola sebagai ruang yang tidak hanya “ada” secara material, melainkan juga “hidup” dalam imajinasi mahasiswa. Hal ini dapat diwujudkan melalui penataan interior yang mencerminkan identitas intelektual, penggunaan simbol atau visual tokoh pemikir, serta konsistensi komunikasi publik yang menegaskan bahwa perpustakaan adalah rumah bagi diskusi kritis.

Praktik baik ini dapat ditemukan di beberapa perguruan tinggi lain. Misalnya, Perpustakaan Universitas Indonesia dengan ikon Crystal of Knowledge yang sejak awal dirancang untuk menjadi landmark akademik, sehingga mahasiswa secara otomatis mengasosiasikannya dengan pusat aktivitas ilmiah. Demikian pula, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada secara rutin menggelar forum diskusi lintas disiplin yang menghadirkan dosen dan mahasiswa, sehingga perpustakaan bukan hanya tempat mengakses koleksi, tetapi juga titik temu wacana kritis. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa citra simbolik perpustakaan tidak lahir secara instan, melainkan dibentuk melalui strategi komunikasi, desain ruang, dan kegiatan yang konsisten.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA telah menyediakan ruang fisik yang representatif, namun belum sepenuhnya berhasil membangun fungsi simboliknya sebagai pusat budaya diskusi kritis. Ruang diskusi yang ada belum cukup dikenal atau digunakan secara luas oleh mahasiswa. Akibatnya, potensi perpustakaan sebagai tempat pembentukan diskursus akademik belum terwujud secara optimal.

Implikasinya, perpustakaan perlu membangun citra simbolik yang kuat melalui strategi komunikasi visual, promosi aktif, dan pelibatan komunitas mahasiswa. Penataan

ruang diskusi dengan elemen visual yang mencerminkan semangat intelektual, penyelenggaraan diskusi rutin dengan topik relevan, serta kerja sama lintas fakultas dan organisasi mahasiswa dapat memperkuat persepsi perpustakaan sebagai ruang diskursus. Dengan cara ini, perpustakaan tidak hanya hadir sebagai ruang fisik yang nyaman, tetapi juga sebagai simbol kolektif ruang publik akademik yang inklusif, kritis, dan dialogis, sebagaimana dicita-citakan oleh Habermas (Carriquiry, 2022).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini memperluas kajian teori ruang publik Habermasian dengan menunjukkan bahwa keberfungsian ruang publik akademik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi simbolik dan strategi place-making. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan bahwa perpustakaan perguruan tinggi dapat dipahami sebagai arena deliberasi akademik yang memerlukan pengelolaan komunikasi dan citra, bukan sekadar penyediaan layanan koleksi dan ruang belajar.

Bagi pengelola perpustakaan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan; 1) Strategi Branding Akademik – membangun citra perpustakaan sebagai ruang public diskursif melalui promosi, media sosial, dan kegiatan akademik regular; 2) Kolaborasi Multipihak – menjalin kerja sama antara pustakawan, dosen, dan organisasi mahasiswa untuk menghadirkan forum diskusi lintas disiplin yang berkesinambungan; 3) Insentif Partisipasi – memberikan rekognisi akademik atau penghargaan bagi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan diskusi dan literasi kritis; 4) Optimalisasi Fasilitas – menata ulang ruang agar lebih mendukung interaksi kolektif, termasuk menyediakan area khusus untuk forum diskusi public; 5) Penelitian ini membuka peluang bagi studi komparatif dengan perpustakaan perguruan tinggi lain yang telah berhasil menjadi ikon ruang publik akademik.

Kajian etnografis mengenai pengalaman mahasiswa dalam menggunakan perpustakaan sebagai arena diskusi juga disarankan untuk memperdalam pemahaman tentang praktik partisipasi. Selain itu, penelitian berbasis evaluasi kuantitatif, seperti pengukuran jumlah forum atau seminar yang diselenggarakan per semester, dapat memperkuat data empiris dan melengkapi analisis kualitatif.

Perpustakaan dan Kearsipan UNISMA memiliki potensi signifikan sebagai ruang publik akademik dalam membentuk budaya diskusi kritis di kalangan mahasiswa. Secara umum, prinsip-prinsip ruang publik menurut Jürgen Habermas, seperti akses terbuka, kebebasan berpendapat, dialog kritis dan rasional, kesetaraan partisipasi, kebebasan dari dominasi politik dan ekonomi, serta orientasi pada kepentingan umum, telah tercermin dalam praktik perpustakaan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Fasilitas fisik sudah tersedia dengan baik,

namun masih terdapat hambatan prosedural dan kurangnya promosi yang menghambat partisipasi aktif mahasiswa. Budaya diskusi kritis juga belum mengakar kuat, dan belum ada dukungan sistematis untuk membentuk ruang simbolik yang merepresentasikan fungsi deliberatif perpustakaan.

Sehingga saran untuk pengelola perpustakaan untuk lebih meningkatkan Kerjasama dengan UKM dan Fakultas atau Program studi untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan perpustakaan. Terutama pada Hari kunjung Perpustakaan. Kegiatan berjejaring antar perpustakaan perguruan tinggi juga menjadi saran untuk meningkatkan keberguaan ruang publik yang tidak hanya dapat digunakan oleh civitas akademika Universitas Islam Malang sendiri, melainkan bisa digunakan oleh civitas akademika dan rekan-rekan dari perpustakaan institusi lain.

Secara umum, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran perpustakaan sebagai ruang publik tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga memerlukan strategi komunikasi, promosi, serta penguatan budaya akademik yang partisipatif dan inklusif. Dengan pendekatan teoritis Habermas dan dukungan empirik dari temuan lapangan, penelitian ini merekomendasikan perlunya inisiatif kolaboratif antara pustakawan, dosen, dan mahasiswa untuk mengoptimalkan fungsi diskursif perpustakaan dalam mendukung literasi kritis dan pembentukan opini publik akademik yang rasional. Dengan demikian, perpustakaan dapat benar-benar hadir sebagai ruang demokratis yang membentuk nalar kritis mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adetayo, A. J., Adekunmisi, S. R., Otonekwu, F. O., & Adesina, O. F. (2023). The Role of Academic Libraries in Facilitating Friendships Among Students. *Ifla Journal*, 49(4), 694–703. <https://doi.org/10.1177/03400352231191540>
- Andini, Y., & Fuady, N. (2024). Lanskap Terapeutik Pada Perpustakaan: Redefinisi Peran Perpustakaan Pascapandemi Covid-19. *Pustaka Karya Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 12(1), 65–79. <https://doi.org/10.18592/pk.v12i1.12410>
- Bakardjieva, M. (2024). On Communicative Rationality with Passion. *Javnost*, 31(1), 46–63. <https://doi.org/10.1080/13183222.2024.2311021>
- Bradshaw, C., Atkinson, S., & Doody, O. (2017). Employing a Qualitative Description Approach in Health Care Research. *Global Qualitative Nursing Research*, 4. <https://doi.org/10.1177/2333393617742282>
- Budiyanto, D., & Ridho, M. R. (2024). Social Media Discourse Analysis to Improve Students' EFL Critical Thinking in Universitas Tridinanti. *Global Expert Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(1), 5–13. <https://doi.org/10.36982/jge.v12i1.4392>

- Carriquiry, A. (2022). Thinking with Habermas, after Habermas: the role of the press in the (digital) public sphere. *Sistema*, 2022(263), 49–64. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85133170804&partnerID=40&md5=44ba9d22f7b4e019c84f1dcb189f03fe>
- Duvenage, P. (2018). A critical reconstruction of the concept of the public sphere in Habermas (and the mass media). *Tydskrif vir Geesteswetenskappe*, 58(4), 701–715. <https://doi.org/10.17159/2224-7912/2018/v58n4-1a6>
- Fraser, N. (2020). *Transnationalizing the Public Sphere*. 379–402. <https://doi.org/10.4324/9781003074977-24>
- Fuchs, C. (2021). The Digital Commons and the Digital Public Sphere: How to Advance Digital Democracy Today. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 16(1). <https://doi.org/10.16997/wpcc.917>
- Gjerazi, B. (2024). Media Literacy in the Era of Globalization: Innovative Strategies for Decoding Information. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, 11(1 S1), 18. <https://doi.org/10.56345/ijrdv11n1s104>
- Habermas, J. (2022). Reflections and Hypotheses on a Further Structural Transformation of the Political Public Sphere. *Theory Culture & Society*, 39(4), 145–171. <https://doi.org/10.1177/02632764221112341>
- Indriani, A. N. L., Fahmiy, F., Muadhom, M., & Saefudin, A. (2024). Pentingnya Perpustakaan Digital Sebagai Sumber Belajar Di Era Society 5.0. *Bibliotika Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 8(1), 152. <https://doi.org/10.17977/um008v8i12024p152-162>
- Istiarni, A., & Kurniasari, E. (2020). Peran perpustakaan digital dalam menciptakan ruang publik: Studi kasus perpustakaan digital Universitas Lampung. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(1), 31–52.
- Kawamoto, M., & Koizumi, M. (2022). Library as Place: Conceptual Model for Public Libraries and Their Transition. *Journal of Documentation*, 79(2), 376–397. <https://doi.org/10.1108/jd-02-2022-0046>
- Kellner, D. (2024). Habermas and the mutations of the public sphere. *Philosophy and Social Criticism*, 50(1), 10–27. <https://doi.org/10.1177/01914537231223845>
- Kleinschmit, D. (2012). Confronting the demands of a deliberative public sphere with media constraints. *Forest Policy and Economics*, 16, 71–80. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2010.02.013>
- Knapp, J. A. (2013). ESSAYISTIC MESSAGES: INTERNET NEWSGROUPS AS AN ELECTRONIC PUBLIC SPHERE. In *Internet Culture* (pp. 181–197). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203948873-20>
- Mensah, I. & Onyanha, O. B. (2021). Academic libraries as public spheres: A case study of South African universities. *Library Management*, 42(6), 409–423.
- Naharuddin, Syahdan, Pare Allo, K., Ismaya, & Akbar, I. (2025). Efektivitas Layanan Ruang Baca Anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER)*, 7(1), 38–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jiper.v7i1.29888>

- Nasrullah, N., Nur, M. Z., & Mukhtar, A. (2024). Strategi Perpustakaan Dalam Memaksimalkan Program Literasi Informasi Di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. *Pusaka*, 12(1), 192–208. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v12i1.1477>
- Piomalli, E. (2024). From the Public Sphere to Echo Chambers: Jürgen Habermas on the New Transformation of the Public Sphere. *Iride*, 37(2–3), 429–442. <https://doi.org/10.1414/116273>
- Prasetyo, A. A. (2022). Disruption of libraries as public spaces: Dissecting Jürgen Habermas's thoughts and digital public spaces. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 213–218.
- Qomariyah, A. N., & Rahmi, L. (2017). Upaya perpustakaan perguruan tinggi dalam menciptakan ruang publik: Kajian Wifi Zone Corner di Perpustakaan ITS. *Pustakaloka*, 9(1), 23–36.
- Rauchfleisch, A. (2017). The Public Sphere as an Essentially Contested Concept: A Co-Citation Analysis of the Last 20 Years of Public Sphere Research. *Communication and the Public*, 2(1), 3–18. <https://doi.org/10.1177/2057047317691054>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ushkin, S. G. (2024). Social Media, Fake News and Deliberative Democracy. *Russian Sociological Review*, 23(2), 379–391. <https://doi.org/10.17323/1728-192x-2024-2-379-391>
- Warner, J. (2013). The new refeudalization of the public sphere. In *The Routledge Companion to Advertising and Promotional Culture* (pp. 285–297). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203071434-34>
- Xu, E., Wang, W., & Wang, Q. (2023). The Effectiveness of Collaborative Problem Solving in Promoting Students' Critical Thinking: A Meta-Analysis Based on Empirical Literature. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01508-1>